

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Andi Zaenal, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Afandi, Dedi, 2017, *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Atmodirono, Haroen dan Njowito Hamdani, 1980, *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Chazawi, Adam, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Yogyakarta.
- Dipraja, R. Achmad Soema, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, 2014, Setara Press, Malang.
- Freidman, Lawrance, 1975, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Hadisoeparto, Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

- Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik ( Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran )*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Perdanakusuma, Musa, 1984, *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko , 1987, *Penyidik. Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Soegandhi, 2000, *Peranan Dokter dalam Penanganan Visum et Repertum dan Pemeriksaan Bedah Jenazah Medicolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Ansori, Muhammad Ridho, “Talas sebagai Obat Herbal untuk Mempercepat Penyembuhan Luka”, *Jurnal Agromed Unila*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Afandi, Dedi, “Otopsi Virtual”, *Majalah Kedokteran Indonesia*, Vol. 59, No. 7, Juli 2009.

- Afandi, Dedi, “Visum et Repertum Perlukaan : Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka”, *Majalah Kedokteran Indonesia*, Vol. 60, No.4, April 2010.
- Alamri, Hadi, “Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. V, No.1, Januari-Februari 2017.
- Kastubi, “Fungsi Bedah Mayat Forensik ( Autopsi ) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016.
- Makie, Indra, “Fungsi Otopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5, Juni 2016.
- Nurhadianto, Fajar, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2015.
- Suryadi, Taufik, “Penentuan Sebab Kematian dalam Visum et Repertum pada Kasus Kardiovaskuler”, *Jurnal Averrous*, Vol. 5, No. 1, Mei 2019.

### C. Hasil Penelitian

- Iqbal, Muhammad, 2016, Peranan Ilmu Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta.
- Pratiwi, Filza Elfrizza Pratiwi, 2019, Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana dalam Upaya Menemukan Kebenaran Materiil, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wikansari, Ria Restu, 2019, Pertimbangan Penyidik dalam Penentuan Permintaan Bedah Mayat ( Autopsi Forensik ) kepada Dokter Forensik pada Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sleman dan Kota Yogyakarta , *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### D. Internet

- Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum”,  
[http://www.jimly.com/makalah/namafil\\_e/56](http://www.jimly.com/makalah/namafil_e/56) diakses pada 22 November 2019.

Hidayat, Avit, “Mayat Mirna Tidak Diotopsi, Ini Alasan Dokter Forensik RSCM”,

<https://www.google.co.id/amp/s/metro.tempo.co/amp/800479/mayat-mirna-tidak-diotopsi-ini-alasan-dokter-forensik-rscm>, diunggah pada 31 Agustus 2016, diakses pada 2 Februari 2020 .

Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tabanan, “Visum et Repertum”,  
<https://iditabanan.org/visum-et-repertum>, diakses pada 1 Februari 2020.

Sakti, Putra Pancasila, “Korban Diksar Maut Pendarahan hingga ke Paru-Paru”,  
<https://m.lampost.co/berita-hasil-otopsi-ada-pendarahan-hingga-ke-paru-korban-diksar.html>, diunggah pada 28 Oktober 2019, diakses pada 27 Februari 2020.

Setiono, “Hasil Otopsi Mantan Istri Sule Meninggal Selanjutnya Kasus Dihentikan”,  
<https://www.antvklk.com/hiburan-hasil-otopsi-mantan-istri-sule-meinggal-selanjutnya-kasus-dihentikan>, diunggah pada 31 Januari 2020, diakses pada 27 Februari 2020.

Simanjuntak, Kamaruddin, “Otopsi dan Visum et Repertum”, 6 Mei 2019,  
<http://www.prolegalnews.id/Menu-Berita/Opini/Otopsi-and-Visum-Et-Repertum.html>, diakses pada 21 Oktober 2019.

Pratiwi, Priska Sari dan Martahan Sohuturon, “Menyidik Pembunuhan Mirna Tanpa Autopsi”,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025142349-12-167803/menyidik-pembunuhan-mirna-tanpa-autopsi>, diunggah pada 27 Oktober 2016, diakses pada 21 Oktober 2019.

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 ).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 ).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 ).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 ).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 ).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 ).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145 ) *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772 ).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861 ).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 686 Tahun 2012).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Otopsi Forensik.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

#### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 349/Pid.B/2013/PN. Smn. perihal perkara Fernando Sahat Parulian Purba dan Tomi Age Pramuda Wardana, 31 Oktober 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN. Smn. perihal perkara Arie Soebianto, 9 Juli 2015.